



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN I	- Reviu Dana Alokasi Khusus (Minggu ke 2 Januari) 2 (Dua) Tim	- Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Minggu ke 1 Februari) 1 (Satu) Tim	- Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Banjarmasin (Minggu ke 1 Maret) 1 (Satu) Tim - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Minggu ke 3 Maret) 1 Tim 1 (Satu) Tim	- Pemeriksaan Ketaatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Minggu ke 1 April) 1 (Satu) Tim	- Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 (Minggu ke 2) 1 (Satu) Tim	- Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2024 (Minggu ke 1) 1 (Satu) Tim - Reviu Dana Alokasi Khusus (Minggu ke 2)	- Probit Audit (Minggu ke 1) 2 (Dua) Tim	- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 (Minggu ke 2) 1 (Satu) Tim	- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Minggu ke 1) 1 (Satu) Tim - Audit Kinerja Bidang Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Minggu ke 3) 1 (Satu) Tim	- Audit Ketaatan di Dinas Pendidikan, Bidang Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama (Minggu ke 1) 2 (Dua) Tim	- Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Minggu ke 1) 1 (Satu) Tim	- Reviu Dana Alokasi Khusus (Minggu ke 1) 2 (Dua) Tim - Monitoring Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV 2023 (Minggu ke 3 dan 4) 1 (Satu) Tim
	- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bos Semester 2 (Minggu ke 3 Januari) Tahun 2022 1 (Satu) Tim	- Reviu Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Minggu ke 3 Februari) 1 (Satu) Tim	- Monitoring Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I 2023 (Minggu ke 3 dan 4 Maret) 1 (Satu) Tim	- Pemeriksaan Ketaatan di Bidang Jalan dan Jembatan (Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) (Minggu ke 1 April) 1 (Satu) Tim	- Pemeriksaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Minggu ke 3) 2 (Dua) Tim	- Reviu Rancangan Akhir RPKD 2023 Perubahan (Minggu ke 3) 1 (Satu) Tim - Monitoring Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II 2023 (Minggu ke 3 dan 4) 1 (Satu) Tim	- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Semester 1 Tahun Anggaran 2023 (Minggu ke 3) 2 (Dua) Tim	- Reviu Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2023 (Minggu ke 3) 1 (Satu) Tim	- Monitoring Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III 2023 (Minggu ke 3 dan 4) 1 (Satu) Tim	- Reviu Dana Alokasi Khusus (Minggu ke 3) 2 (Dua) Tim	- Audit Tujuan Tertentu Perjalanan Dinas (Minggu ke 2) 1 (Satu) Tim	- Penutupan Kas Akhir Tahun 2022 (Minggu ke 4 Desember) 1 Tim

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN II	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Tim I)	Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2022 (Tim I)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Urusan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah (Tim I)	Audit Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tim I)	Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) (Tim I)	Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Tim I)	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Tim I)	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2023 (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Barat (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Tim I)
						Pemeriksaan Ketaatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tim II)	Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) (Tim II)					Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2023 (Tim II)
	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Tim II)	Pemeriksaan Ketaatan pada BKD Diklat TA 2022 (Tim II)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Tim II)	Pemeriksaan Ketaatan Urusan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah (Tim II)	Audit Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Tim II)	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan pada : 1. Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar; 2. Bidang Kemetrolagian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tim I)	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Tim II)	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2023 (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Tim II)	Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Utara (Tim II)	Penutupan Kas Akhir Tahun 2023 (Tim I)
						Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 (Tim II)	Pemeriksaan Ketaatan pada : 1. Bidang Perindustrian ; 2. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan ; 3. Sekretariat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tim II)					Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2023 (Tim II)

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN III	Penutupan Kas dan Stock Opname Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah	Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Audit Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Audit Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Reviu Rencana Kerja Perubahan 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus 2023	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK) Puskesmas	Reviu Dana Alokasi Khusus 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus 2023
	Reviu Dana Alokasi Khusus 2022	Audit Ketaatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2022	Reviu Dana Alokasi Khusus		Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024	Reviu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Audit Dinas Kesehatan			Penutupan Kas Akhir Tahun 2023
		Reviu Dana Alokasi Khusus	Reviu Dana Alokasi Khusus				Reviu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023					
IRBANSUS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Sapu Bersih Pungutan Liar	Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Pendampingan Zona Integritas	Sosialisasi SPI	Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dan Gratifikasi				
	-----TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH -----											
SEKRETARIAT	----- PENGAWASAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT -----											
	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah											

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA